

PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP BELANJA PENDIDIKAN

Nur Rohmah Hidayati¹, Andy Dwi Bayu Bawono²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: nurrohmahhidayati87@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of fiscal space, locally generated revenue (PAD), general allocation funds (DAU), Poverty Rate (PPM), and Average Years School (RLS) on Education Expenditures. The population used in this study is all regency/city on Indonesia. The sampling method in this research using purposive sampling method, collected data processed 505 regency/city samples. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21.00. The results of this study indicate that fiscal space, locally generated revenue (PAD), general allocation fund (DAU) affect education expenditures. While the average length of school (RLS) negatively influences education expenditure. The Percentage of Poor Population (PPM) has no effect on Education Expenditures.

Keywords: Education Expenditures, Fiscal Space, PAD, DAU, Poverty Rate, and Mean Years School

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Persentase Penduduk Miskin (PPM), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Belanja Pendidikan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dengan metode purposive sampling, mengumpulkan data yang diolah 505 sampel Kabupaten/Kota. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21.00 perangkat lunak. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ruang fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan. Sementara rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara negatif terhadap Belanja Pendidikan. Sedangkan Persentase Penduduk Miskin (PPM) tidak berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan.

Kata Kunci : Belanja Pendidikan, Ruang Fiskal, PAD, DAU, Persentase Penduduk Miskin, dan Rata-rata Lama Sekolah

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu bangsa yang maju dan lebih baik saat ini, hal tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Untuk memenuhi tercapainya sumber daya yang berkualitas, maka pendidikan adalah salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan tiap individu. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dan dalam hal ini diperlukan respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Dalam Undang-undang tersebut Pemerintah menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan; pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan dasar tanpa biaya; dan pemerintah diberi mandat untuk mengalokasikan APBN minimal 20% dari pengeluarannya untuk pendidikan, dengan anggaran tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

Otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih mengetahui kelemahan dan kelebihan didaerahnya pada tingkat yang paling bawah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan didalam masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat agar terjadi pemerataan dan keadilan (Bawono, et al 2017). Pada saat ini peningkatan pengeluaran belum dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian pada *outcomes* bidang pendidikan. Wujud nyata dari regulasi tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Tidak hanya itu, berbagai regulasi tentang pelaksanaan pendidikan juga dikembangkan dimulai dengan standarisasi dalam konten pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, standarisasi pengelolaan pendidikan, proses pembelajaran sarana dan pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan, dan bahkan sampai pada standar penilaian.

Anggaran daerah biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian Indonesia agar lebih baik yaitu dengan memaksimalkan adanya *fiscal space*. Peter S. Heller (2015) mengemukakan bahwa *fiscal space* atau ruang fiskal merupakan ketersediaan ruang yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Ketika terjadi desentralisasi mengenai sektor pendidikan, secara implisit anggaran pendidikan dimasukkan kedalam alokasi anggaran pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang berbasis pada formula yang ditetapkan yakni berbasis pada potensi penerimaan dan kebutuhan fiskal suatu daerah.

Pendapatan asli daerah menandakan seberapa mandiriya suatu daerah dalam mengelola dana. Semakin tinggi pendapatan asli daerah tersebut, maka kemandirian daerah tersebut juga dikatakan mengalami peningkatan. Dengan terjadinya peningkatan kemandirian daerah tersebut maka pemerintah harus lebih meningkatkan alokasi belanjanya, salah satunya yaitu alokasi belanja pendidikan daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang masih cukup tinggi di Indonesia dan dalam hal ini diperlukan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah daerah maupun pusat, terutama bagi pemerintah daerah untuk menyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dan untuk segera mencari solusi untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut (Wibowo, 2014). Menurut Kuznet dalam Todaro (2011), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai

pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Data dari dinas pendidikan menunjukkan bahwa masih adanya kondisi anak putus sekolah tiap tahunnya dan faktor penyebabnya berupa ketiadaan biaya, pemahaman dari orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak, karena membantu orang tua dalam mencari nafkah, atau memang ada hal yang disengaja karena memang sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya dibangku sekolah. Hal ini juga menyebabkan rendahnya rata-rata lama sekolah yang ditempuh pada pendidikan di Indonesia ini. Selain kualitas pendidikan, tempat tinggal penduduk juga diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Dengan mengetahui bahwa kualitas pendidikan penduduk terkait dengan kemiskinan maka muncul permasalahan bagaimana hubungannya dan besar pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja pendidikan daerah. Sedangkan penelitian oleh Rasmita (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fakhry (2017) menyatakan bahwa ruang fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah yang didalamnya terdapat belanja pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kabupaten/kota masih mengalokasikan sebagian besar dana/pendapatan yang bebas dan tersedia untuk belanja operasional, sehingga belanja daerahnya juga relatif masih kecil. Penelitian oleh Syamsuri (2018) dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah pada IPM melalui pengujian parsial, Belanja fungsi Pendidikan, ekonomi dan perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dan arah yang dihasilkan adalah negatif. Hal ini menandakan bahwa kenaikan ketiga belanja fungsi tersebut akan menurunkan indeks kemiskinan atau menurunkan persentase penduduk miskin di Indonesia. Penelitian oleh Adha (2016) menyatakan bahwa Belanja Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran belanja pendidikan yang dialokasikan pemerintah akan mengakibatkan penurunan persentase penduduk miskin.

Stakeholders Theory adalah suatu pendekatan yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan menjelaskan secara analitis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas usaha. Teori *Stakeholder* Freeman (1984) dalam Roberts (1992) mendefinisikan stakeholder seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan organisasi. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas organisasi, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi tersebut. Hal pertama yang perlu diketahui mengenai teori *Stakeholder* adalah bahwa *Stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *Stakeholder*.

Anggaran merupakan alat utama dalam kebijakan fiskal, anggaran juga merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi salah satunya dibidang pendidikan dalam menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ruang fiskal suatu daerah dapat diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan *penggunaannya* yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan

Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, belanja yang sifatnya mengikat yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga (Hidayat, 2013). Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis untuk menguji pengaruh ruang fiskal terhadap belanja pendidikan adalah sebagai berikut :

H1: Ruang Fiskal Berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan.

Pendapatan asli daerah menandakan seberapa mandiri suatu daerah dalam mengelola dana. Semakin tinggi pendapatan asli daerah tersebut, maka kemandirian daerah tersebut juga dikatakan mengalami peningkatan. Dengan terjadinya peningkatan kemandirian daerah tersebut maka pemerintah harus lebih meningkatkan alokasi belanjanya, salah satunya yaitu alokasi belanja pendidikan daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Surya, et al (2015) mendapatkan *hasil* bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja pendidikan secara signifikan. Penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap belanja pendidikan. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi faktor penentu dalam perubahan alokasi belanja modal pada bidang pendidikan. Dalam hal itu, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih menggali dan memanfaatkan potensi dari kekayaan alam yang ada pada daerahnya.

Pada penelitian Lisandri, et al (2017) menyatakan bahwa PAD adalah salah satu faktor produktivitas dari *pemerintah* daerah. Peningkatan dalam pengembangan inovasi aset produktif yang dikerjakan oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya peningkatan dana yang dialokasikan untuk belanja daerah. Semakin besarnya pendapatan asli daerah, maka semakin mandiri pula suatu daerah. Namun sebesar-besarnya capaian dari PAD ini apabila dikelola dengan cara yang tidak efisien maka Pendapatan tersebut akan banyak terserap untuk biaya operasional pemerintah saja. Sehingga tidak berpengaruh pada belanja modal bidang pendidikan. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja pendidikan adalah sebagai berikut :

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan.

Dana Alokasi umum merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan, dimana anggaran yang terdapat pada DAU adalah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat yang bersumber pada pendapatan APBN. Dana alokasi umum memiliki tujuan untuk keseimbangan fiskal antar daerah, apabila suatu daerah memiliki kemampuan fiskal yang rendah membutuhkan kebutuhan fiskal yang tinggi, maka alokasi dari DAU suatu daerah menjadi semakin *besar*. Oleh karena itu, transfer DAU yang besar bertujuan untuk mengcover kebutuhan fiskal suatu daerah. Tidak sedikit pula pemerintah daerah banyak yang memanfaatkan transfer dari dana alokasi umum ini hanya cukup untuk mengcover biaya administrasi dasar pemerintah yang merupakan akibat dari kelebihan pegawai pada pemerintahan daerah.

Penelitian oleh Adytama (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal, dengan hal tersebut menandakan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) meningkatkan belanja modal khususnya pada belanja bidang pendidikan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2015) yang mendapatkan hasil bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah bidang pendidikan, hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas yang lebih kecil. Apabila nilai DAU semakin tinggi, maka akan mengakibatkan nilai belanja daerah tersebut juga tinggi. Hal tersebut terjadi karena DAU adalah dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk melakukan pendanaan kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dan pembangunan suatu daerah, salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan.

Pengentasan kemiskinan melalui pengeluaran pemerintah yang pro terhadap masyarakat miskin seperti pemenuhan kebutuhan dasar, merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Selain itu program-program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian diprediksi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Secara umum kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam suatu pendidikan, yang dapat diartikan pula jika anak-anak terlahir dalam kemiskinan maka mereka akan tidak siap dalam menempuh pendidikan atau bersekolah dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Mihaela, et al (2015) mengatakan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap pendidikan dimana hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap belanja pendidikan daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM Melalui pengujian parsial, Belanja fungsi Pendidikan, ekonomi dan perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dan arah yang dihasilkan adalah negatif. Hal ini menandakan bahwa kenaikan ketiga belanja fungsi tersebut akan menurunkan indeks kemiskinan atau menurunkan persentase penduduk miskin di Indonesia. Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi resiko kemiskinan pada suatu Negara yaitu salah satunya dengan peningkatan pendidikan pada Negara tersebut dan diharapkan Negara tersebut dapat menciptakan suatu pendidikan dan pelatihan dengan sistem yang lebih inklusif di semua tingkatan dan untuk segala usia, tingkat sekolah dasar dan menengah, pendidikan tinggi atau pelatihan kejuruan. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis untuk menguji pengaruh Persentase kemiskinan terhadap belanja pendidikan adalah sebagai berikut :

H4 : Persentase Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan

Penelitian yang dilakukan oleh Bado(2017) menjelaskan bahwa pada belanja pendidikan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, sehingga dapat mendorong output luaran terutama rasio guru-murid, hanya saja belum berhasil mendorong *outcome* pendidikan. *Outcome* pendidikan itu sendiri berupa angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan melek huruf. Dengan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah akan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan pekerja dengan tingkat pendidikan \leq Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian tersebut menghasilkan bahwa belanja sektor pendidikan diproksi dengan 3 (tiga) variabel yaitu belanja gaji, belanja barang, jasa, dan modal, dan belanja operasional yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata-rata lama sekolah, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri (2018) yang menghasilkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis untuk menguji pengaruh Rata-Rata Lama sekolah terhadap Belanja Pendidikan adalah sebagai berikut :

H5 : Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/kota diseluruh Indonesia tahun 2018 yang terdiri dari 508 kabupaten/kota. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 505 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah Purposive sampling. Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari website www.djpk.co.id dan <http://www.bps.go.id>.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Bidang Pendidikan. Belanja bidang pendidikan merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan belanja pelayanan

public yang diukur dengan Rupiah. Sedangkan variabel independent terdiri dari Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah dalam mengalokasikan APBN bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Ruang Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Ruang Fiskal} = \text{Pendapatan Daerah} - (\text{Pendapatan Hibah} + \text{DAK} + \text{Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus} + \text{Dana Darurat}) - (\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Bunga}) \dots \dots \dots (1)$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- HPD = Hasil Pajak Daerah
- RD = Retribusi Daerah
- PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
- LPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

DAU merupakan salah satu komponen belanja APBN dan merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD yang dilakukan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung Dana Alokasi Umum :

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

- AD = Alokasi Dasar
- CF = Celah Fiskal

Menurut BPS Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulam dibawah garis kemiskinan. Rumus untuk menghitung persentase penduduk miskin :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

- $\alpha = 0$
- z = garis kemiskinan.
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- n = jumlah penduduk.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah dapat diperoleh melalui rumus :

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

- RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
- x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun
- N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Persentase Penduduk Miskin, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Belanja Pendidikan. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Untuk proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Sampel

Sampel	Jumlah
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia	508
Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data lengkap	3
Jumlah sampel	505

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan multikolinieritas

a. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan CLT (*Central Limit Theorem*) atau Teorema Limit Pusat menunjukkan bahwa ukuran sampel lebih dari 30 ($n > 30$) maka data terdistribusi normal. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 505 > 30, sehingga dapat disimpulkan data penelitian terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan dengan nilai *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam data. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
RF	0,644	1,552	Tidak terdapat multikolinearitas
PAD	0,427	2,342	Tidak terdapat multikolinearitas
DAU	0,795	1,258	Tidak terdapat multikolinearitas
PPM	0,620	1,612	Tidak terdapat multikolinearitas
RLS	0,655	1,527	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dari seluruh variabel independen kurang dari 0,10 dan nilai VIF dari variabel independen lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Agar dapat terbebas dari heteroskedastisitas, maka nilai signifikasinya harus lebih besar dari *level of significant* (α) 5% atau sebesar 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
RF	0,273	Tidak ada heteroskedastisitas
PAD	0,891	Tidak ada heteroskedastisitas
DAU	0,943	Tidak ada heteroskedastisitas
PPM	0,930	Tidak ada heteroskedastisitas
RLS	0,513	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai sig variable independen Ruang fiskal 0,754, Pendapatan Asli Daerah 0,891, Dana Alokasi Umum 0,943, Persentase Penduduk Miskin 0,930, dan Rata-rata Lama Sekolah 0,513 memiliki nilai lebih besar dari *level of significant* (α) 5% berarti tidak mempengaruhi variable dependen sehingga bisa dikategorikan tidak terkena heteroskedastisitas.

Analisis regresi berganda (*multiple regresion analysis*) bertujuan untuk menguji hubungan atau pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4. berikut

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.
Constant	6,775	3,962	0,000***
RF	0,140	3,277	0,001***
PAD	0,431	15,348	0,000***
DAU	0,201	3,384	0,001***
PPM	-0,006	-1,628	0,104
RLS	-0,054	-3,267	0,001***
Variabel dependen : Belanja Pendidikan			
F-hit	: 150,857		
Fsig.	: 0,000		
R ² Adjusted	: 0,598		
n	: 505	****signifikan sampai dengan 1%	

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,598 yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 59,8% sedangkan 40,2% dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model. Nilai F hitung sebesar 150,857 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini fit dengan data. Dengan demikian model dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Persentase Penduduk Miskin, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Belanja Pendidikan.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa pada variabel ruang fiskal nilai t hitung sebesar 3,277 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H1 diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel ruang fiskal terhadap belanja

pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula belanja daerahnya sehingga akan meningkatkan fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah terutama pada belanja pendidikannya. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan besarnya nilai ruang fiskal yang ada, maka kemungkinan alokasi belanja daerah yang dilakukan suatu daerah akan tinggi. seperti hasil dari penelitian oleh Hidayat (2013).

Dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 15,348 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ yang berarti H_2 diterima, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mengelola dana yang berasal dari daerahnya sendiri dengan baik untuk belanja pendidikan daerah. mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja pendidikan secara signifikan. Hasil tersebut sama dengan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya, et al (2015) juga menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap belanja pendidikan. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi faktor penentu dalam perubahan alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan. Dalam hal itu, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih menggali dan memanfaatkan potensi dari kekayaan alam yang ada pada daerahnya. Pendapatan asli daerah menandakan seberapa mandiri suatu daerah dalam mengelola dana. Semakin tinggi pendapatan asli daerah tersebut, maka kemandirian daerah tersebut juga dikatakan mengalami peningkatan. Dengan terjadinya peningkatan kemandirian daerah tersebut maka pemerintah harus lebih meningkatkan alokasi belanjanya, salah satunya yaitu alokasi belanja pendidikan daerahnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi jumlah transfer pemerintah pusat maka akan dapat meningkatkan PAD pada daerah otonomi. Temuan ini memberikan indikasi adanya peningkatan pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi pemerintah dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi (Rusmita, 2016).

Dari hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa pada variabel dana alokasi umum nilai t hitung sebesar 3,384 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_3 diterima dan terdapat pengaruh positif antara variabel dana alokasi umum terhadap belanja pendidikan. Hasil ini sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan Wahyuni (2019) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja pendidikan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar pada bidang pendidikan juga dipengaruhi oleh transfer dana pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diharapkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat karena DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar.

Dari analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa pada variabel persentase penduduk miskin memberikan nilai t hitung sebesar -1,628 dengan nilai probabilitas signifikan $0,104 > 0,05$ yang berarti H_4 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel persentase penduduk miskin terhadap belanja pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan tidak tepat sasaran dalam membantu masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang layak, hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Fithri (2017). Pemerintah daerah di seluruh Indonesia belum mengalokasikan belanja pendidikan dengan mendasarkan pada jumlah penduduk miskin. dan dalam hal ini diperlukan peran pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah

harus memprioritaskan alokasi anggaran yang dianggap sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.

Dari analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa pada variabel rata-rata lama sekolah nilai t hitung sebesar -3,267 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ yang berarti H5 diterima dan terdapat pengaruh negatif antara variabel dana alokasi umum terhadap belanja pendidikan. Hal ini dikarenakan peningkatan anggaran belanja pendidikan masih belum mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Permasalahannya bukan hanya bagaimana meningkatkan anggaran pendidikan semata, melainkan bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian anggaran ini digunakan dengan lebih baik dan lebih tepat sehingga peningkatan rata-rata lama sekolah pada IPM dapat terpenuhi. provinsi maupun kabupaten/kota.

Seperti hasil penelitian oleh Handayani (2009) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat akan semakin mudah bagi setiap individu dalam usia kerja untuk mengerti, menerapkan, dan mendapatkan hasil dari pendidikannya yang akhirnya meningkatkan pembangunan manusia. Hasil tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tentang peningkatan sektor pendidikan di Seluruh Indonesia belum mendapat perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah pusat, pemerintah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang fiskal, PAD, DAU dan rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap belanja Pendidikan. Sedangkan variabel prosentase penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap belanja Pendidikan. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah terutama pada belanja pendidikannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi faktor penentu dalam perubahan alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan. Peningkatan anggaran belanja pendidikan dapat mengurangi rata-rata lama sekolah sehingga dapat memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) kearah yang lebih baik.

Referensi

- Adha, Rendy Bayu. 2016. Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung).
- Adyatma, E & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 4, No. 2, Hal 190-205.
- Anggraeni, Felicia Asri. 2016. Pengaruh Rasio Ketergantungan, Kemandirian, Efisiensi, Dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Arifin, Baqtiar. 2017. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Universitas Terbuka Jakarta.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta : Stie Ykpn.
- Bado, Basri, Sitti Hasbiah. 2017. Analisis Pertumbuhan Belanja Sektor Pendidikan terhadap Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan.

- Bawono, Andy Dwi Bayu, Fauzan, Eny Kusumawati, Heppy Purbasari. 2017. Analisis Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa).
- Fakhry, Muh. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Prov Lampung.
- Fithri, Naylal. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Malang: UNIBRAW.
- Freeman, R. E., (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing
- Ghozali, Imam. 2012. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 20”. Semarang: Undip.
- Hadi, Sasana. 2016. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi Dki Jakarta)
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Handayani, Kristina. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi. Surakarta: UNS.
- Heller, Peter S. (2005). Back To Basics: *Fiscal Space. What It Is And How To Get It*. Finance And Development Vol. 25 No. 2 June 2005.
- Hidayat, M F 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kab Kota Di Jawa Timur).
[Http://www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/).
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mihai, Mihaela, 2015. *Education And Poverty. The Bucharest University Of Economic Studies*. Bucharest : Romania Institute Of National Economy.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rusmita, Sari. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 5, No. 3, 237 – 257.
- Subandi 2014 *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta
- Suryandari, A Nurmalita. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014. Yogyakarta: UNY.
- Surya, A., & Darwanis, S. A. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pekerjaan Umum (Studi Pada Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4 Vol, 3, Hal 1-14.
- Syamsuri, M Rizki. 2018. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh). Medan : Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1 Tentang Pengalokasian Dana Pendidikan
- Wahyuni, Maulidya. 2019. Pengaruh Pendapan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Ksusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Wibowo, Moh, Erhan. 2014. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah).
- [Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Yao, G.A. 2007. *Fiscal Dezentralization and Proverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence. Dissertation.* Georgia: Georgia State University.
- Yuliarni, Anindita. 2012. *Analisis Tingkat Belanja Pendidikan Dikabupaten Boyolali.* Surakarta: UMS.